

Nasab dan Kekuasaan Simbolik
(Analisis Sosiologis Atas Polemik Rekontekstualisasi Nasab Ba'Alwi di Indonesia)

Liniage and Symbolic Power
(Sosiological Analys of the Polemic of Recontextualizing Ba'alwi Liniage in Indonesia)

Muhammad Nasyirudin

Universitas Islam Balitar, Indonesia
E-mail: hansaba1620@gmail.com

Artikel Info	ABSTRAK
Diterima: 1 Maret 2025	Pada masyarakat muslim tradisional, nasab bukan hanya dilihat sebagai keturunan biologis, tetapi sebagai simbol yang memiliki nilai kapital sosial dan keagamaan. Gelar-gelar seperti sayyid atau habib dalam komunitas Ba'alwi menjadi simbol otoritas spiritual dan moral, yang memberikan legitimasi dalam struktur sosial. Teori kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu membantu memahami nasab sebagai konstruksi sosial yang mengatur hierarki berdasarkan pengakuan terhadap status keagamaan. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis wacana, penelitian ini bermaksud menganalisis bahwa simbol berperan penting dalam membentuk relasi kuasa dan produksi pengetahuan dalam masyarakat. Kontroversi tentang keabsahan nasab, yang tercermin dalam riset genealogi Imaduddin Utsman Al-Bantani, mencerminkan adanya konflik antara pelestarian tradisi keagamaan dan dorongan untuk kesetaraan sosial. Oleh karena itu, nasab berfungsi sebagai elemen yang menghubungkan dimensi spiritual, politik identitas, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat yang kaya akan makna.
Hal. 66-78	
Kata Kunci: Nasab; Simbolik; Kekuasaan; Keagamaan; Identitas.	
Keywords: Liniage; Symbolic; Power; Religiosity;Identity.	<p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>In traditional Muslim societies, lineage is not only seen as biological descent, but as a symbol with capital value in social and religious contexts. Titles such as Sayyid or Habib in the Ba'alwi community become symbols of spiritual and moral authority, providing legitimacy within the social structure. Pierre Bourdieu's theory of symbolic power helps to understand lineage as a social construct that organizes hierarchy based on religious status recognition. Through a literature study and discourse analysis approach, this research aims to analyze how symbols play an important role in shaping power relations and the productions of knowledge in society. The controversy surrounding the legitimacy of lineage, as reflected in the genealogy of Husainuddin Utsman Al-Bantani, illustrates the existence of conflicts between tradition preservation and the drive for social equality. Therefore, lineage functions as an element that links spiritual, political identity, and the dynamics of power in a society rich in meaning.</i></p>

PENDAHULUAN

Nasab memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat Muslim tradisional, terutama dalam menentukan status sosial dan legitimasi keagamaan. Gelar Sayyid atau Habib, yang merujuk pada keturunan Nabi Muhammad, menjadi indikator otoritas moral dan spiritual. Di kawasan seperti

Hadramaut dan Asia Tenggara, keturunan Ba‘alwi, yang menyandang gelar habib, dianggap sebagai pemimpin religius dan sosial.

Otoritas simbolik ini muncul dari klaim keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Ali bin Abi Thalib. Di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir dan pusat dakwah, kelompok Ba‘alwi memainkan peran yang sangat penting dalam struktur sosial-keagamaan. Oleh karena itu, status mereka tidak hanya dilihat dari segi sosial tetapi juga dianggap sebagai simbol otoritas keagamaan yang diterima oleh masyarakat (Ho, 2006: 129).

Dalam bukunya *Menakar Kesahihan Nasab Habib* di Indonesia, Imaduddin Utsman Al-Bantani (2022:47-88) menyatakan bahwa klaim keturunan Nabi oleh kelompok Ba‘alwi baru muncul pada abad ke-9 Hijriah melalui kitab al-Burqat al-Musyiqoh, dan sebelumnya tidak terdapat bukti kuat yang mencantumkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia juga menegaskan bahwa nama Ubaidillah tidak ditemukan dalam literatur Nasab Mu‘tabar (umum) dari abad ke-4 hingga ke-8 Hijriah, sehingga munculnya nama tersebut di periode selanjutnya patut diragukan keabsahannya. Berdasarkan riset terhadap manuskrip klasik, Imaduddin menyimpulkan bahwa klaim nasab habib di Indonesia kepada Nabi Muhammad SAW tidak memiliki dasar yang valid secara ilmiah dan historis.

Penelitian genealogis Imaduddin Utsman al-Bantani telah memicu kontroversi di ruang publik Indonesia, khususnya terkait klaim keturunan habib sebagai dzurriyah Nabi Muhammad SAW. Melalui karya-karyanya, Kiai Imad mempertanyakan keabsahan nasab Bani Alawi (Ba‘alwi), yang menjadi dasar identitas banyak habib di Indonesia (at-Tanari, distriknews.com, 2025). Penelitian ini juga menimbulkan reaksi beragam di masyarakat.

Sebagian warganet mendukung pendekatan kritis terhadap klaim nasab habib, sementara pihak lain menganggapnya sebagai bentuk penistaan terhadap simbol keagamaan. Di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), terjadi pergeseran sikap: sekitar 80% warga NU mulai meragukan klaim keturunan Ba‘alwi setelah munculnya tesis Kiai Imad, meskipun 20% lainnya masih mempertahankan keyakinan lama (walisongobangkit.com, 2025).

Polemik peninjauan ulang nasab Ba‘alwi menarik untuk dikaji secara sosiologis karena berkaitan erat dengan bagaimana simbol digunakan sebagai alat legitimasi dalam masyarakat muslim. Nasab, yang tampaknya hanya bersifat genealogis, sesungguhnya mengandung nilai status dan otoritas dalam struktur sosial keagamaan. Melalui teori kapital simbolik (Bourdieu dalam Iqbal, 2023) dapat dipahami bahwa nasab berfungsi sebagai bentuk kekuasaan yang diproduksi dan direproduksi secara sosial dan institusional. Oleh karena itu, konflik seputar nasab tidak hanya bersifat personal atau kultural, tetapi juga terkait dengan dinamika kekuasaan dan kontrol sosial yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif sosiologis yang eksploratif dan interpretatif untuk menelusuri makna sosial dan relasi kuasa dalam produksi pengetahuan dan kebudayaan (Denzin & Lincoln, 2005:3). Wacana dipahami sebagai praktik sosial yang sarat kepentingan dan relasi kuasa, dibentuk melalui simbol, bahasa, dan tindakan. Analisis wacana digunakan untuk mengungkap bagaimana bahasa menjadi alat dominasi sosial dan ideologis dalam teks (Fairclough, 1995:7).

Teori kekuasaan simbolik Bourdieu menjelaskan bahwa dominasi berlangsung secara halus melalui habitus, modal, dan medan sosial. Modal simbolik menjadi kunci dalam memahami legitimasi budaya dan otoritas pengetahuan yang dikonstruksi dalam ruang sosial (Bourdieu, 1991: 23–25). Individu atau institusi dengan modal simbolik tinggi memiliki kapasitas lebih besar dalam membentuk narasi dominan. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan analisis wacana dan teori kekuasaan simbolik, serta divalidasi dengan triangulasi sumber (Flick, 2009: 444).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Ba‘alwi sebagai Arena Kekuasaan Simbolik

Kelompok Ba‘alwi atau Bani Alawi, dzurriyah Nabi melalui jalur Husain bin Ali, berasal dari Hadhramaut dan dikenal luas sebagai sayyid (Ho, 2006:189). Kelompok ini menjaga kemurnian ajaran dan identitas nasab melalui praktik endogami serta mempertahankan otoritas religius di wilayah diaspora seperti Indonesia, Malaysia, dan Afrika Timur. Di Indonesia, keturunan Ba‘alwi dikenal sebagai habib dan dihormati karena peran mereka dalam dakwah, tasawuf, dan kehidupan spiritual masyarakat. Tradisi pencatatan nasab resmi dilakukan melalui Syajarat al-Ansab untuk menjaga identitas kolektif (Hasanudin & Gunawan, 2009: 45–60).

Fenomena “pentas habib” dalam dakwah publik hingga ke ruang politik seperti Kompleks Parlemen Senayan, serta penerbitan syajarat al-nasab sebagai bukti keabsahan garis keturunan Alawiyyin, menunjukkan peran aktif Rabithah Alawiyah dalam menjaga kesinambungan Islam berbasis nasab. Organisasi yang berdiri sejak 27 Desember 1928 ini tidak hanya memfasilitasi legitimasi keturunan Ba‘alwi melalui pencatatan silsilah, tetapi juga turut melestarikan warisan keilmuan dan spiritual. Melalui berbagai aktivitas tersebut, Rabithah Alawiyah memperkuat karakter Islam Nusantara yang menyatukan spiritualitas, tradisi, serta pengakuan sosial-politik (Rabithah Alawiyah, 2025).

Dalam konteks tersebut, konsep kekuasaan simbolik dari Pierre Bourdieu (1991:170) membantu menjelaskan bagaimana para habib, khususnya keturunan Ba‘alwi, memperoleh dan mempertahankan posisi terhormat di masyarakat tanpa paksaan fisik. Kekuasaan simbolik memungkinkan dominasi sosial berlangsung secara halus melalui pengakuan atas simbol, gelar, dan legitimasi nasab yang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang alami. Gelar “habib” beserta syajarat al-nasab menjadi instrumen simbolik yang memperkuat otoritas religius dan sosial mereka di ruang publik. Dengan demikian, penghormatan terhadap keturunan Nabi melalui institusi seperti Rabithah Alawiyah bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga merupakan manifestasi dari kekuasaan simbolik yang efektif dalam membentuk struktur sosial Islam Nusantara.

Konsep habitus dari Pierre Bourdieu memperdalam pemahaman atas bagaimana legitimasi simbolik seperti nasab bekerja melalui disposisi mental yang terbentuk dari pengalaman sosial, menjadikan penghormatan terhadap habib tampak alamiah dalam masyarakat. Habitus membentuk cara berpikir dan bertindak individu yang sesuai dengan struktur sosial, sementara modal simbolik, seperti gelar atau nasab, berperan sebagai sumber kekuasaan yang diakui secara sosial. Modal simbolik ini menjadi efektif karena dilegitimasi oleh budaya dan institusi, menjadikan garis keturunan sebagai alat untuk memperoleh otoritas tanpa paksaan.

Simbol-simbol seperti syajarat al-nasab dan gelar habib bertindak sebagai “mata uang simbolik” yang menopang dominasi religius dan sosial lintas generasi. Dalam konteks Islam Nusantara, pengakuan kolektif terhadap nasab para habib menunjukkan bagaimana dominasi simbolik dapat direproduksi dan diterima secara tidak sadar oleh masyarakat (Bourdieu, 2011:119–120). Melengkapi konsep habitus dan modal simbolik, Bourdieu (1994:76) mengemukakan bahwa medan (*field*) adalah arena sosial tempat simbol seperti nasab diperebutkan untuk memperoleh otoritas dalam hierarki sosial, khususnya dalam medan keagamaan.

Pada konteks para habib, nasab menjadi senjata simbolik yang dilembagakan melalui pendidikan, nilai keluarga, dan institusi seperti Rabithah Alawiyah. Proses reproduksi kekuasaan simbolik ini memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial dan menciptakan kesan bahwa dominasi tersebut bersifat alamiah. Nasab, yang awalnya hanya catatan genealogis, berubah menjadi instrumen kekuasaan melalui pengakuan kolektif dan internalisasi nilai-nilai sosial (Bourdieu, 1991:170) dengan demikian, kekuasaan simbolik para habib tetap bertahan dan dihormati secara sukarela oleh masyarakat dalam kerangka dominasi yang halus dan berkelanjutan.

Pada kerangka kekuasaan simbolik dan medan sosial, kebenaran mengenai nasab juga merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi, internalisasi, dan institusionalisasi (Berger & Luckmann, 1991:1–15). Aktor-aktor seperti ulama, tokoh adat, dan lembaga keagamaan berperan sebagai penjaga makna, menjadikan nasab bukan hanya fakta biologis,

tetapi simbol yang dilembagakan oleh struktur sosial dominan. Lembaga seperti Rabithah Alawiyah dan dokumen syajaratun nasab memperoleh legitimasi sebagai otoritas genealogi dalam masyarakat Islam tradisional. Sejalan dengan itu, Foucault (2002:131) menekankan bahwa kebenaran adalah hasil dari relasi kuasa dalam jaringan wacana, sehingga klaim atas nasab melibatkan pertarungan makna dan otoritas. Dalam konteks ini, legitimasi para habib atas dasar nasab merupakan bentuk kemenangan simbolik dalam medan sosial yang mereka kuasai.

Otoritas agama memainkan peran sentral dalam konstruksi wacana nasab, di mana pengakuan terhadap seorang sayyid atau habib lebih didasarkan pada legitimasi sosial dan spiritual daripada bukti ilmiah (Howell, 2001:704). Simbol-simbol keagamaan memperkuat posisi mereka, namun dalam era modern, pendekatan akademik mulai mengkritisi narasi tradisional tersebut melalui analisis sejarah, antropologi, dan sosiologi. Simbol seperti nasab hanya berdaya jika diakui dalam ranah sosial tertentu melalui mekanisme pengakuan timbal balik. Di Indonesia, terutama dalam masyarakat Muslim tradisional, nasab tetap menjadi identitas simbolik yang menghubungkan agama, otoritas, dan peran sosial keagamaan. Maka, dominasi simbolik para habib bertahan melalui keseimbangan antara warisan tradisional dan penerimaan sosial kontemporer.

Dinamika sosial dan perkembangan media informasi telah membuka ruang kritik yang lebih luas terhadap klaim simbolik seperti nasab. Media sosial dan forum intelektual menjadi arena munculnya narasi tandingan yang menantang legitimasi simbolik berbasis keturunan. Pergeseran ini mencerminkan perubahan dalam regime of truth, yakni sistem produksi dan legitimasi kebenaran dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Michel Foucault (1980:131). Narasi tentang nasab kini tidak lagi dimonopoli oleh satu kelompok, melainkan bersaing dengan otoritas akademik dan opini publik yang semakin kritis.

Polemik Rekontekstualisasi Nasab Ba‘alwi

Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah salah satu peneliti independen yang dikenal kritis terhadap konstruksi nasab dalam komunitas keagamaan, khususnya terkait nasab Ba‘alwi. Ia mempublikasikan sejumlah karya yang mempertanyakan validitas garis keturunan sebagian individu atau keluarga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Alawiyin (Al-Bantani, 2023:14). Dalam risetnya, ia menyebutkan bahwa terdapat ‘ketidaksesuaian historis, dokumen yang lemah, dan penambahan silsilah tanpa dasar ilmiah’ dalam beberapa jalur nasab Ba‘alwi (Al-Bantani, 2023:25).

Argumen utama Al-Bantani (2023:32) adalah bahwa sebagian besar jalur nasab Ba‘alwi di Indonesia tidak memiliki dokumentasi silsilah yang sah dan koheren dengan sumber-sumber primer nasab di Hadramaut, Yaman. Ia membandingkan manuskrip silsilah tua dari Hadramaut dengan data nasab lokal di Indonesia, dan menemukan perbedaan yang signifikan, baik dari segi nama, urutan generasi, maupun bukti dokumenter yang menyertainya. Misalnya, Al-Bantani menunjukkan bahwa silsilah keluarga Sayyid Al-Haddad di Indonesia mencantumkan seorang tokoh bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad yang tidak ditemukan dalam manuskrip silsilah tua Hadramaut seperti Al-Mashadir al-Ashliyah li-Nasab Alawiyin karya Al-Saqqaf.

Selain itu, urutan generasi dalam silsilah lokal kerap kali melompati satu hingga dua generasi dibandingkan dengan silsilah referensi di Tarim yang tercatat secara konsisten melalui sanad turun-temurun. Al-Bantani juga menyoroti minimnya bukti dokumenter pendukung seperti ijazah nasab, stempel ulama, atau sanad keilmuan yang biasa menyertai klaim keturunan di Hadramaut (Al-Bantani, 2023:34). Bahkan terdapat nama fiktif seperti Sayyid Mahmud bin Ja‘far al-Kamil yang tidak ditemukan dalam Mawsu‘ah Ansab Alawiyin maupun karya genealogi klasik lainnya.

Metodologi yang digunakan oleh Al-Bantani (2023:37) bersifat interdisipliner, menggabungkan pendekatan historiografi klasik, kritik dokumen, dan filologi. Ia menelusuri silsilah melalui manuskrip kuno, arsip keluarga, dan wawancara dengan penjaga nasab tradisional (sayyid) di Hadramaut dan Asia Tenggara. Selain itu, Al-Bantani (2023:41-46) juga menggunakan pendekatan kritik sanad, yang umumnya digunakan dalam studi hadis, untuk menilai keutuhan transmisi data nasab. Dalam temuannya, Al-Bantani mengungkapkan bahwa beberapa tokoh Ba‘alwi ternama yang

aktif berdakwah di Indonesia sejak abad ke-18 tidak tercatat dalam silsilah resmi Alawiyyin yang terdokumentasi di Tarim dan Seiyun, Yaman.

Temuan ini memunculkan perdebatan mengenai keaslian garis keturunan sebagian tokoh tersebut dan membuka ruang baru untuk mengkaji ulang narasi sejarah penyebaran Islam dan konstruksi identitas keturunan di Nusantara. Temuan KH Imaduddin Utsman al-Bantani mengenai keturunan Ba'alwi memicu reaksi keras dari kalangan habib di Indonesia, yang menilai kajian tersebut sebagai serangan terhadap kehormatan dzurriyah Rasulullah. Dalam tesisnya, KH Imaduddin menyatakan bahwa nasab Ba'alwi tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan historis, serta mengajukan pertanyaan kritis terhadap validitas silsilah mereka (distriknews.com, 23 Januari 2025).

Sebagai respons, forum tabayyun terbuka digelar di Banten pada Agustus 2023 untuk membahas isu ini. Dalam forum tersebut, KH Imaduddin mengajukan tiga pertanyaan penting mengenai sumber-sumber primer yang mendukung klaim nasab Ba'alwi, namun tidak ada jawaban memuaskan yang diberikan oleh para pendukung nasab tersebut (rminubanten.or.id, 1 November 2023). KH Imaduddin menegaskan bahwa validasi nasab memerlukan bukti sejarah yang kuat, bukan hanya klaim spiritual atau tradisi lisan, ia mengkritik pandangan yang mengabaikan pentingnya sumber-sumber sejarah dalam menilai keabsahan nasab.

Beberapa tokoh habib telah menyampaikan pernyataan resmi melalui media sosial dan ceramah mengenai riset KH Imaduddin Utsman al-Bantani yang mereka anggap dapat menimbulkan kegaduhan dan fitnah. Habib Lutfi bin Yahya, dalam sebuah forum di Pekalongan, menyampaikan lima pesan penting untuk menghindari fitnah zaman. Meskipun tidak menyebut nama langsung, beliau menekankan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan ulama salafus shalih dalam menghadapi cobaan akhir zama (jatman.or.id, 24 September 2023).

Sementara itu, Gus Nasrullah Afandi, seorang kiai NU dan pakar Maqashid Syariah, menegaskan bahwa perdebatan mengenai nasab Ba'alwi di ruang publik, terutama di media sosial, telah jatuh ke dalam kategori haram. Beliau menyatakan bahwa perdebatan semacam ini lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada manfaat, dan menyerukan agar diskusi mengenai nasab dilakukan dalam koridor akademik dan kajian ilmiah yang lebih sehat (timesindonesia.co.id, 06 September 2024).

Bahkan, dalam Majelis Keluarga Besar Alawiyyin di Jakarta, disampaikan sikap resmi menolak legitimasi akademik KH Imaduddin Utsman al-Bantani dan menyerukan klarifikasi publik darinya. KH Imaduddin Utsman al-Bantani sendiri menilai bahwa Tarekat Alawiyah tidak memenuhi syarat sebagai tarekat muktabarah, terutama dalam lingkup Nahdlatul Ulama (NU). Beliau mengkritisi kejelasan struktur, wirid khusus, maupun sanad keilmuan dari Tarekat Alawiyah (distriknews.com, 25 Januari 2025).

Di sisi lain, sejumlah akademisi memandang pendekatan kritis yang dilakukan oleh Al-Bantani sebagai bagian sah dari proses ilmiah dalam masyarakat Islam modern. Dalam artikelnya Firmanda Taufiq (alif.id, 05 April 2024) menyoroti pentingnya evaluasi terhadap konstruksi otoritas keagamaan yang berbasis garis keturunan, terutama dalam konteks jaringan habaib dan ulama di Jawa. Senada dengan itu, Khotimi Bahri dalam sebuah artikel di Liputan9.id, menegaskan bahwa klaim nasab tidak boleh menjadi alat legitimasi sosial tanpa disertai transparansi data dan bukti, serta pentingnya verifikasi ilmiah terhadap klaim genealogis. Khotimi Bahri juga menekankan pentingnya pendekatan historis-kritis dalam studi Islam Indonesia agar diskursus tentang genealogi tidak terjebak dalam romantisme masa lalu (liputan9.id, 7 September 2024).

Respons masyarakat terhadap kritik KH Imaduddin Utsman al-Bantani terhadap klaim nasab Ba'alwi sangat beragam. Sebagian kalangan muda Muslim yang aktif di media sosial menyambut positif keberanian al-Bantani. Mereka menganggap bahwa kritik terhadap elitisme berbasis nasab merupakan bagian dari upaya dekonstruksi simbol-simbol feodal dalam Islam. Komentar-komentar dukungan muncul di berbagai forum daring, disertai kutipan-kutipan dari riset al-Bantani.

Di platform seperti Kompasiana, diskusi mengenai dampak tesis al-Bantani menunjukkan bahwa kajian tersebut telah menghentak diskursus sosial keagamaan di kalangan Islam tradisionalis Indonesia (Tamwifi, kompasiana.com, 29 November 2023). Sementara itu, artikel di Mudanews

menyoroti bahwa kajian al-Bantani telah menarik perhatian dan memicu pro-kontra di berbagai platform, meskipun tidak semua respon berada dalam jalur ilmiah (Aulia, mudanews.com, 15 April 2023). Bahkan di media sosial, diskusi mengenai nasab Ba'alwi menjadi perbincangan hangat, mencerminkan dukungan terhadap pembacaan ulang warisan keagamaan secara rasional dan terbuka (at-Tanari, distriknews.com, 24 Januari 2025).

Namun, tidak sedikit pula netizen yang menolak riset Al-Bantani, terutama dari kalangan pengikut habib dan jamaah tarekat yang memandangnya sebagai bentuk penghinaan terhadap ahlul bait. Kritik terhadap Al-Bantani banyak bermunculan di media sosial, di antaranya tuduhan bahwa ia tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas dan risetnya dianggap sarat dendam pribadi serta tidak murni akademik. Dalam sebuah pengajian yang ditayangkan di kanal YouTube Sayyid Bahar Bin Sumaith Official, Habib Bahar bin Smith menegaskan bahwa para habaib telah dimuliakan oleh Allah dan tidak membutuhkan sanjungan manusia, sebagai tanggapan terhadap pihak yang mempertanyakan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW (news.republika.co.id, 15 Mei 2023).

Sementara itu, dalam khutbah Jumat yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, beliau memperingatkan bahwa mempertanyakan nasab orang saleh tanpa izin dan sanad yang sah bisa menjadi bentuk ghurur ilmiah yang membahayakan spiritualitas, sebagaimana dijelaskan dalam kitab risalah Imam Abul Qosim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Husaini (newsroom.id, 13 April 2024). Perdebatan mengenai otentisitas nasab kini merambah ruang akademik daring melalui diskusi terbuka di Zoom dan YouTube, melibatkan sejarawan, antropolog, dan ahli silsilah. Ilham Muhamad Nurjaman dkk. (2023) mencatat bahwa penulisan nasab di Nusantara dipengaruhi oleh tradisi historiografi Islam sejak masa Bani Umayyah, dengan organisasi seperti Rabithah Alawiyah menjadi contoh penting dalam pemeliharaan nasab keturunan Rasulullah SAW di Indonesia.

Sementara itu, Muzemmil (2024) dalam penelitiannya mengkaji bagaimana *Channel YouTube Rhoma Irama* membingkai isu polemik nasab habaib, menekankan pentingnya pendekatan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis serta menghindari pengkultusan individu tertentu tanpa landasan kuat. Diskusi di kanal YouTube Islam Nusantara Institute juga memperluas ruang perdebatan ini ke kalangan mahasiswa dan peneliti muda, menunjukkan bahwa isu nasab tetap relevan dalam kajian Islam kontemporer.

Riset Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang nasab Ba'alwi telah mengguncang struktur simbolik komunitas Ba'alwi dan membuka perdebatan penting dalam sosiologi pengetahuan Islam, khususnya terkait relasi antara ilmu, kekuasaan, dan identitas. Dengan menantang monopoli klaim kebenaran religius yang selama ini dipegang kelompok tertentu, riset ini menjadi bentuk disputasi terhadap kapital simbolik yang telah mapan (Bourdieu, 1991:137). Meskipun menuai kontroversi, pendekatan kritis Al-Bantani mencerminkan dinamika wacana sosial-keagamaan kontemporer yang kian terbuka terhadap kritik internal dan menuntut landasan ilmiah dalam menerima simbol-simbol keagamaan.

Forum-forum keagamaan, baik daring maupun luring, turut merespons polemik ini dengan diskusi dan pembacaan ulang silsilah secara publik, sebagai bentuk penegasan legitimasi nasab dan penolakan terhadap kritik Al-Bantani yang dianggap tidak memahami ilmu nasab serta tidak beradab secara ilmiah (Azra, 2004: 105–107). Fenomena ini mencerminkan pergeseran diskursus tentang nasab dari ruang privat ke ruang publik yang lebih terbuka, sebagaimana dijelaskan Jürgen Habermas (1989: 102) menyatakan bahwa diskursus tradisional dalam ruang komunikasi modern yang memungkinkan kritik terhadap otoritas simbolik. Dalam konteks ini, media sosial menjadi arena baru bagi negosiasi makna dan otoritas, mendorong transformasi fungsi nasab dari simbol sakral menuju entitas yang dapat dipertanyakan secara rasional dan kolektif.

Riset Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mempertanyakan keabsahan nasab sebagian keturunan Ba'alwi telah menciptakan guncangan psikologis bagi individu dan kelompok yang mengandalkan nasab sebagai fondasi identitas religius dan sosial. Keraguan publik terhadap legitimasi garis keturunan mereka menambah tekanan mental, terlebih ketika komentar negatif bermunculan di media sosial, seperti yang diungkapkan oleh seorang narasumber dalam akun Ngaji Warisan Ulama yang merasa ‘terhukum oleh opini, bukan oleh hukum syar‘i’ (Ngaji Warisan Ulama,

2023). Fenomena ini menggambarkan bagaimana identitas sosial yang dilegitimasi secara simbolik dapat membentuk realitas subjektif dan martabat kolektif, sebagaimana dijelaskan oleh Berger dan Luckmann bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang menjadi dasar bagi pembentukan kesadaran individu (Berger & Luckmann, 1991:174).

Selain itu, munculnya etos egalitarian yang menuntut legitimasi berbasis kompetensi mencerminkan runtuhan karisma tradisional, sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber (1978:215) dalam konteks masyarakat modern, bahwa bentuk-bentuk otoritas karismatik semakin melemah seiring rasionalisasi dan dominasi otoritas legal-rasional. Delegitimasi nasab turut mempengaruhi posisi sosial-politik tokoh keagamaan yang selama ini memperoleh kepercayaan publik karena faktor keturunan. Di tingkat lokal, keturunan habib sering berperan sebagai mediator konflik atau penengah dalam urusan sosial karena dianggap memiliki kehormatan khusus.

Namun, ketika keaslian nasab mereka diragukan, peran sosial ini pun ikut dipertanyakan. Penelitian oleh Hasanudin dan Setiarso (2023:75) menunjukkan bahwa sebagian nasab habib di Indonesia tidak memiliki keterhubungan genealogis yang sah dengan Nabi Muhammad SAW, berdasarkan analisis terhadap manuskrip dan silsilah kuno. Dalam konteks politik, sejumlah kandidat lokal di Jawa dan Sulawesi yang menggunakan gelar “habib” mulai kehilangan dukungan publik akibat isu keaslian nasab.

Hal ini menunjukkan bahwa simbol keagamaan tetap memiliki daya mobilisasi politik namun rentan terhadap krisis legitimasi. Di ruang publik digital, kelompok Islam populis memanfaatkan riset tersebut untuk menolak dominasi habib dalam dakwah dan politik, seraya menyuarakan narasi kontra-elitisme. Misalnya, akun media sosial @generasiummat menyatakan, “Kami tidak anti habib, tapi anti feodalisme agama” (Panji Islam.com, 13 September 2023).

Diskursus ini mencerminkan resistensi terhadap struktur simbolik yang dianggap tidak egaliter. Beberapa intelektual Muslim seperti Wahab (uinjkt.ac.id, 11 Juni 2024) melihatnya sebagai peluang untuk transisi otoritas dari simbol ke substansi, menekankan pentingnya kualitas moral dan intelektual daripada garis keturunan dalam kepemimpinan keagamaan. Di tengah situasi ini, masyarakat awam mengalami kebingungan identitas, sebagaimana dijelaskan oleh Bauman (dalam Robertus, 2015:98) tentang kondisi “modernitas cair” yang penuh ambiguitas nilai dan struktur.

Jika tidak disikapi dengan dialog terbuka dan pendekatan inklusif, delegitimasi nasab dapat berujung pada polarisasi ekstrem dan dekonstruksi lembaga simbolik tradisional. Kontestasi nasab memiliki implikasi psikologis, sosial, dan budaya yang mendalam. Polemik ini tidak hanya mempengaruhi identitas spiritual individu yang bergantung pada nasab, tetapi juga berpotensi menimbulkan polarisasi sosial antara yang mempertahankan klaim nasab dan yang mendukung pendekatan ilmiah. Jika tidak dikelola dengan bijaksana, delegitimasi nasab dapat merusak kepercayaan terhadap institusi keagamaan dan mengikis budaya penghormatan terhadap keturunan Nabi, membuka ruang bagi redefinisi otoritas keagamaan berbasis kapasitas personal dan keilmuan (Hasanudin & Setiarso, 2023:130).

Delegitimasi Nasab: Pertarungan Tradisi dan Rasionalitas

Nasab dalam masyarakat tradisional lebih dari sekadar asal-usul biologis, melainkan kapital simbolik yang mencerminkan kekuasaan melalui pengakuan sosial terhadap legitimasi simbol tertentu (Bourdieu, 1991:230). Dalam konteks komunitas keagamaan, nasab berfungsi sebagai sumber otoritas yang membentuk hierarki sosial, seperti keturunan Nabi Muhammad SAW yang dihormati di wilayah mayoritas Muslim seperti Yaman, Indonesia, dan Afrika Timur sebagai simbol berkah spiritual dan otoritas moral (Ho, 2006:158). Contohnya adalah keluarga Ba‘alwi dari Hadhramaut, Yaman, yang membawa legitimasi nasab mereka ke Nusantara sejak abad ke-17 dan menjadi pemimpin ritual serta moral dalam komunitas Islam Asia Tenggara (Scholz, 2019:210).

Otoritas simbolik nasab dimanfaatkan dalam berbagai konteks sosial-politik di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Habib Ali Alhabisy, Habib Husein bin Abu Bakar Alaydrus, dan Habib Rizieq Shihab menggunakan identitas nasab mereka untuk membangun jejaring keagamaan dan pengaruh politik. Nasab menjadi alat mobilisasi massa dan legitimasi tindakan, seperti yang terlihat dalam aksi

212 tahun 2016, di mana Habib Rizieq Shihab menegaskan identitasnya sebagai keturunan Nabi untuk memperkuat moral dan legitimasi gerakan (Maulana, 2020: 137). Dalam orasinya, Habib Rizieq menyatakan bahwa aksi tersebut diikuti jutaan orang berkat pertolongan Allah, meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menggagalkannya (rmol.id, 05 Desember 2016).

Di beberapa daerah seperti Pekalongan dan Pasuruan, tokoh habib juga sering berperan sebagai mediator dalam konflik sosial-politik lokal, mengandalkan otoritas nasab sebagai juru damai maupun penggerak aksi massa. Bahkan dalam pemilu daerah, dukungan tokoh habib sering dijadikan strategi kampanye oleh calon kepala daerah untuk menarik simpati umat (bernas.id, 17 Desember 2017). Konsep kapital simbolik menjelaskan mengapa otoritas seorang habib tetap diakui meskipun tanpa jabatan formal dalam struktur negara.

Kapital simbolik bersifat tak kasat mata namun efektif menciptakan kepercayaan dan kepuhan masyarakat (Bourdieu, 1991:242). Di Indonesia, gelar "habib" membuka akses ke ruang-ruang publik seperti masjid, lembaga pendidikan, dan media massa tanpa legitimasi administratif. Ceramah habib, terutama yang berlatar belakang nasab Ba'alawi, sering lebih diminati jamaah daripada akademisi tanpa keturunan Nabi (Hasanudin & Setiarso, 2023:150). Bahkan, dalam acara kenegaraan, habib sering diundang untuk memimpin doa atau ceramah bukan hanya karena keilmuan, tetapi karena simbol nasab yang dimilikinya (Surur et al., 2024:82).

Kepercayaan ini diperkuat oleh konstruksi sosial yang diwariskan turun-temurun dan diperkuat oleh media serta lembaga keagamaan tradisional. Tidak semua individu dengan nasab mulia otomatis mendapatkan pengaruh sosial. Legitimasi simbolik tetap harus diperkuat dengan praktik keagamaan, pengabdian sosial, dan etika yang konsisten.

Ketika seorang habib hidup sederhana dan dekat dengan masyarakat, maka nilai nasabnya akan semakin menguat (Ho, 2006:163). Sebaliknya, jika keturunan Nabi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual, maka legitimasi simboliknya dapat melemah di mata publik. Dengan kata lain, kapital simbolik nasab bersifat dinamis dan bergantung pada proses interaksi sosial yang terus-menerus.

Oleh karena itu, pengaruh sosial seorang habib tidak hanya ditentukan oleh garis keturunannya, tetapi juga oleh cara ia memelihara kehormatan simbolik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan nasab sebagai sumber kekuasaan tidak hanya terbatas pada ranah lokal, tetapi juga membentuk jaringan transnasional yang memperkuat kapital simbolik secara global (Hasanudin & Setiarso, 2023:47). Di Afrika Timur, seperti di Lamu dan Mombasa, nasab digunakan untuk menetapkan pemimpin tarekat atau mufti lokal yang dihormati berbagai etnis Muslim (panjiislam.com, 10 April 2022).

Sementara di Singapura dan Malaysia, keluarga Ba'alwi mengelola masjid-masjid tua seperti Masjid Ba'alwi, yang menjadi pusat dakwah transnasional antar-habib (Islami.co, 15 Maret 2021). Di Amerika Serikat, jaringan Ba'alwi terhubung melalui forum dan organisasi internasional seperti Al-Maqasid dan SeekersGuidance, yang dipimpin oleh keturunan Nabi dengan pengaruh global (panjiislam.com, 20 Juni 2022). Di Indonesia, keberadaan habib Ba'alwi dalam majelis taklim dan tarekat sering lebih dipercaya karena dianggap memiliki "koneksi spiritual" dengan Rasulullah SAW, menunjukkan bagaimana nasab menjadi instrumen mobilisasi sosial dan keagamaan yang efektif (jaringansantri.com, 5 Mei 2021).

Kapital simbolik dalam nasab, meskipun kuat, sering dikritik karena digunakan untuk memperoleh posisi sosial atau ekonomi, yang dianggap sebagai bentuk nepotisme religius (Hasanudin & Setiarso, 2023:52). Riza Sihbudi juga mengungkapkan bahwa gelar habib sering dimanfaatkan untuk meraih jabatan strategis tanpa seleksi kompetensi (Panji Islam, 10 April 2022). Sementara itu, IslamProgresif.ID menilai bahwa pemberian otoritas keagamaan berdasarkan nasab mirip dengan sistem feodalisme yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam Islam (IslamProgresif.ID, 5 Januari 2023).

Meskipun demikian, pengaruh nasab Ba'alwi tetap kuat berkat tradisi keilmuan dan jaringan sosial mereka yang mendalam, tercermin dalam karya-karya ulama Ba'alwi dan pesantren yang mereka dirikan (Jaringan Santri, 5 Mei 2021). Kapital simbolik nasab tercermin dalam penghormatan

terhadap habib, seperti mencium tangan, menempatkan mereka di posisi utama dalam acara keagamaan, dan menyampaikan wasilah doa melalui mereka. Nasab juga dianggap sebagai media spiritual, dengan keyakinan bahwa doa keturunan Nabi lebih mustajab karena kedekatannya dengan Tuhan, yang memperkuat kepercayaan publik dan menjadi modal sosial (Anwar, 2024).

Meskipun era modern semakin rasional, penghormatan berbasis nasab tetap bertahan melalui mekanisme kultural dalam pendidikan keagamaan, menjadikan nasab bagian dari habitus kolektif yang sulit digantikan (Awaluddin, 2023). Di era digital, tokoh-tokoh Ba‘alwi seperti Habib Husein Ja‘far Al-Hadar memanfaatkan platform seperti YouTube dan Instagram untuk memperluas pengaruh, seperti melalui kanal YouTube ‘Jeda Nulis’ dan Instagram @husein_hadar, yang menggabungkan pendekatan populer dengan nilai-nilai keilmuan tradisi Ba‘alwi (Alboneh dkk, 2024). Kapital simbolik bukanlah entitas yang statis; kekuatannya dapat meningkat atau menurun tergantung pada bagaimana ia dipraktikkan dan diakui dalam masyarakat.

Menurut Bourdieu, kapital simbolik berfungsi sebagai bentuk kekuasaan yang diakui secara sosial, yang diperoleh melalui pengakuan kolektif terhadap atribut tertentu seperti kehormatan atau *prestise*. Namun, kekuatan ini sangat bergantung pada habitus—struktur disposisi yang terbentuk dari pengalaman sosial individu. Ketika seorang individu, seperti habib, mempertahankan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai luhur yang diharapkan, ia memperkuat kapital simboliknya. Sebaliknya, kehilangan integritas moral dapat mengikis legitimasi simbolik yang dimilikinya (Bourdieu dalam Huang, 2019).

Nasab keturunan Nabi, khususnya dari jalur habib seperti Ba‘alwi, telah lama menjadi sumber kapital simbolik dalam masyarakat Muslim tradisional. Namun, dalam konteks sosial yang modern, otoritas simbolik ini kini dipertanyakan oleh kalangan intelektual yang menuntut validasi rasional dan historis (Bourdieu, 1991:230). Al-Bantani (2021:113) mencatat bahwa klaim habib sering kali tidak diuji secara ilmiah, namun digunakan untuk menegaskan posisi moral dan spiritual, menjadikan nasab sebagai medan kontestasi yang mencerminkan pergeseran dari dominasi simbolik ke distribusi kapital berbasis kompetensi dan kredibilitas.

Di Indonesia, kritik terhadap praktik pemuliaan nasab mulai muncul, terutama karena dianggap menghambat mobilitas sosial masyarakat non-sayyid yang lebih berkontribusi dalam keilmuan dan dakwah. Delegitimasi simbolik terhadap nasab mencerminkan pergeseran kapital simbolik dalam sosial Islam, di mana otoritas simbolik habib dipertanyakan, memberi ruang bagi aktor lain seperti Abdul Somad dan Adi Hidayat yang menggantikan nasab dengan ilmu dan retorika sebagai modal dominan. Kritik ini bukan penolakan terhadap keturunan Nabi, melainkan penolakan terhadap penggunaan nasab sebagai alat legitimasi kekuasaan, mencerminkan ketegangan antara simbol warisan dan simbol prestasi (Al-Bantani, 2021:116-120).

Perubahan otoritas keagamaan dalam sejarah Islam bukanlah fenomena baru. Sejak masa klasik, banyak ulama non-sayyid yang menjadi mujtahid besar tanpa legitimasi nasab. Dalam konteks kontemporer, proses delegitimasi simbolik ini semakin menonjol melalui media sosial, di mana publik kini aktif menguji klaim keturunan Nabi berdasarkan bukti dan kredibilitas. Misalnya, polemik mengenai nasab habaib di Indonesia mencerminkan pergeseran otoritas keagamaan dari yang berbasis keturunan menuju yang berbasis kontribusi dan kredibilitas individu.

Studi oleh Beni (dalam Muzemmil, 2024:371) menunjukkan bahwa media digital, seperti YouTube, memainkan peran signifikan dalam membungkai isu ini, memungkinkan diskusi publik yang lebih luas dan kritis terhadap klaim nasab. Selain itu, penelitian oleh Zaman (2021:2) mengungkapkan bahwa konten dakwah di YouTube telah menjadi ekspresi kesalehan baru yang mencerminkan kontestasi otoritas keagamaan di era digital. Pergeseran ini menunjukkan rekonfigurasi struktur ladang sosial dan bentuk modal yang dominan dalam masyarakat.

Delegitimasi nasab mencerminkan krisis kepercayaan terhadap elite simbolik, terutama ketika terjadi penyalahgunaan otoritas oleh individu bergelar habib yang menyebabkan penurunan drastis kepercayaan publik (Al-Bantani, 2021:122). Hal ini tidak menghapus otoritas para habib, tetapi mendorong mereka untuk meredefinisi posisi sosial melalui pendidikan, dakwah moderat, dan pengabdian sosial sebagai dasar legitimasi baru. Di sisi lain, delegitimasi ini membuka ruang bagi

rekognisi identitas keagamaan yang lebih inklusif, di mana agama dipahami sebagai ruang bersama, bukan monopoli keturunan Nabi.

Simbol keagamaan bersifat dinamis dan bergantung pada penerimaan sosial, karena simbol hanya hidup sejauh ia dihidupi oleh masyarakat (Bourdieu, 1991:232). Delegitimasi nasab mencerminkan dinamika sosial yang sehat dalam masyarakat modern, di mana kapital simbolik seperti keturunan tidak lagi menjadi satu-satunya dasar legitimasi kepemimpinan. Penelitian Alghozali (2024) menunjukkan bahwa organisasi keagamaan seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menekankan pentingnya integritas moral dan kompetensi teknis dalam pembentukan kepemimpinan, sejalan dengan teori otoritas Max Weber.

Pendekatan ini membuka ruang bagi kepemimpinan keagamaan yang lebih meritokratis dan responsif terhadap tantangan zaman, tanpa merendahkan tradisi, namun untuk mempertahankan makna simbolisme keagamaan dalam konteks kontemporer. Dalam masyarakat tradisional, pengetahuan ditransmisikan secara lisan dan performatif melalui narasi, ritual, dan praktik budaya. Transmisi ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk identitas kolektif dan otoritas sosial.

Namun, modernitas membawa paradigma baru yang menekankan rasionalitas, dokumentasi tertulis, dan verifikasi ilmiah, sehingga menimbulkan ketegangan epistemologis antara tradisi lisan dan pendekatan ilmiah. Dalam konteks pewarisan nasab Ba' alwi, legitimasi genealogis bergantung pada pengakuan komunitas dan transmisi memori kolektif, yang seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis. Hal ini menimbulkan dilema epistemik: apakah memori kolektif tanpa dokumentasi tertulis dapat dianggap sah dalam dunia modern yang menuntut verifikasi ilmiah? Sebagaimana dikemukakan oleh Hountondji (1996: 60), tradisi lisan seringkali dianggap tidak menghasilkan filsafat tanpa adanya transkripsi, menunjukkan tantangan dalam mengakui validitas pengetahuan lisan dalam kerangka epistemologi modern.

Bagi kalangan tradisionalis, rasionalitas modern dianggap mengurangi keterhubungan spiritual manusia dengan sejarahnya, sementara bagi modernis, tradisi dipandang dogmatis dan tidak adaptif. Ketegangan ini menciptakan dikotomi antara kontinuitas kultural dan perubahan struktural, yang tercermin dalam tarik-menarik antara nilai spiritual dan verifikasi ilmiah dalam nasab. Dalam epistemologi kritis, kebenaran diproduksi melalui sistem wacana dan relasi kuasa tertentu, sehingga klaim nasab merupakan produk dinamika tersebut.

Persaingan antara otoritas tradisional seperti habaib dan figur modern seperti ustadz menandai medan pertarungan epistemik, dengan lembaga pendidikan agama, media sosial, dan universitas sebagai arena perebutan otoritas keagamaan (Scholz, 2019:203). Ketika logika modern menyangkal pengetahuan tradisional, komunitas tradisional mengalami delegitimasi identitas, yang mencerminkan bentuk kolonisasi epistemik. Meski demikian, tradisi tidak serta-merta tergantikan, karena nilai-nilai tradisional masih menjadi rujukan moral dan spiritual di banyak masyarakat. Untuk bertahan, tradisi pun beradaptasi dengan bentuk-bentuk modern, seperti yang dilakukan komunitas Ba' alwi melalui dokumentasi silsilah, publikasi sejarah leluhur, dan digitalisasi arsip keluarga (Ho, 2006:172).

Hibridisasi ini memperlihatkan bahwa kebenaran dalam tradisi tidak hanya bersifat logis, tetapi juga indrawi dan spiritual. Ketegangan epistemik antara tradisi dan rasionalitas modern tidak selalu bersifat destruktif, melainkan bisa menjadi peluang bagi lahirnya dialog yang sehat dan pengetahuan yang lebih kontekstual. Di era digital, pertarungan wacana ini makin kompleks karena media sosial menjadi medan baru produksi kebenaran, di mana ceramah habaib dan konten ilmiah sama-sama bersaing merebut kepercayaan publik.

Otoritas kini tidak hanya ditentukan oleh isi, tetapi juga oleh algoritma, opini publik, dan estetika penyampaian, yang menguji baik otoritas simbolik maupun intelektual secara bersamaan (Keen, 2012:89). Maka, alih-alih melihat keduanya sebagai lawan, penting untuk memahami tradisi dan rasionalitas sebagai dua poros yang saling melengkapi dalam membentuk pemahaman kolektif tentang kebenaran dan identitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Nasab bukan hanya garis keturunan biologis, tetapi konstruksi sosial yang menjadi kapital simbolik dalam masyarakat religius seperti komunitas Ba'alwi. Ia berfungsi sebagai legitimasi spiritual dan otoritas sosial, menciptakan hierarki yang sering menimbulkan polemik antara pelestarian tradisi dan tuntutan kesetaraan. Dalam ruang religius, nasab menjadi titik temu antara spiritualitas, politik identitas, dan strategi kuasa yang sarat makna simbolik.

Studi ini menunjukkan bahwa kapital simbolik seperti nasab digunakan elite spiritual untuk membentuk identitas dan mempertahankan otoritas dalam masyarakat Islam Indonesia, sehingga memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial dan konstruksi identitas religius melalui pendekatan teori sosial Bourdieu. Pendekatan dialogis yang mengintegrasikan tradisi dan akademisi mendorong kebijakan sosial inklusif, memperkuat hubungan antar generasi, serta menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap perubahan demi stabilitas dan identitas masyarakat.

REFERENSI

- Alboneh, A., Raehana, S., Hasriani, A., Setiawati, N., & Baedah, S. S. A. (2024). PESAN DAKWAH HABIB HUSEIN JA'FAR AL-HADAR DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(4), 249–262. Diakses dari <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/2887>
- Anwar, A. (2024). Pemanfaatan New Media dalam Dakwah Moderasi Beragama: Analisis Strategi Komunikasi Habib Ja'far Al-Hadar di Youtube. *KOMUNIDA: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 14(2), 231-255. <https://doi.org/10.35905/komunida.v14i2.12194>
- Alghozali, A. M. (2024). Pembentukan Kepemimpinan dalam Organisasi Keagamaan: Analisis Latihan Kader Utama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(1), 74–87. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.4242>
- Arifai, Yusuf. (2024). *Kiai NU Pakar Maqashid, Gus Nasrul Sebut Haram Debat Nasab Habib di Media Sosial*. Diakses dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/509331/kiai-nu-pakar-maqashid-gus-nasrul-sebut-haram-debat-nasab-habib-di-media-sosial?utm>
- Aulia, Fauzaki. (2023). *Ketika Nasab Habaib Jadi Polemik (Menakar Analisa Sejarah Ba Alawi Kyai Imaduddin Utsman al-Bantani)*. Diakses dari <https://mudanews.com/opini/2023/04/15/ketika-nasab-habaib-jadi-polemik-menakar-analisa-sejarah-ba-alawi-kyai-imaduddin-utsman-al-bantani/?utm>
- Awaluddin. (2023). Dakwah Digital Habib Husein Ja'far Al-Hadar Dalam Penyebaran Syiar Islam Moderat. *Idarotuna*, 5(2), 153–168. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v5i2.25865>
- Azra, Azyumardi. (2004). *Islam Substantif: Untuk Keagamaan yang Damai dan Berkeadaban*. Jakarta: Mizan.
- Bahri, Khotimi. (2024). *Ketika Nasab Habaib Jadi Polemik (Menakar Analisa Sejarah Ba Alawi Kyai Imaduddin Utsman al-Bantani)*. Diakses dari <https://liputan9.id/ketika-nasab-habaib-jadi-polemik-menakar-analisa-sejarah-ba-alawi-kyai-imaduddin-utsman-al-bantani/>
- Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books
- Bourdieu, Pierre. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, Pierre. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre. (1994). *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications. Edisi ke-3.

- Fairclough, Norman. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Firmanda, Taufiq. (2024). *Otoritas Keagamaan dan Genealogi Islam Indonesia*. Diakses dari <https://alif.id/read/fmt/otoritas-keagamaan-dan-genealogi-islam-indonesia-b249183p/>
- Flick, Uwe. (2009). *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications. 4th Edition.
- Habermas, Jürgen. (1989), *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Trans. Thomas Burger. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hasanudin, Hasanudin & Setiarso, Gunawan. (2025). Legitmasi Nasab dan Strategi Dakwah Habib Ba'alwi dalam Perspektif Muhammadiyah. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 3(1), 216-224. <https://doi.org/10.62083/7d8qcb83>
- Hountondji, Paulin J. (1996). *Legitimizing African Thought as Philosophical Discourse*. Diakses dari JSTOR: <https://www.jstor.org/stable/26758853>
- Huang, Xiaowei. (2019). Understanding Bourdieu - Cultural Capital and Habitus. *Review of European Studies*, 11(3), 45-49. Diakses dari <https://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/view/0/40384>
- Iqbal, Rizki Muhammad. (2023). *Legitimasi Kebahasaan Pierre Bourdieu: Dialek Bahasa sebagai Kapital dalam Perwujudan Kekuasaan Simbolik*. Diakses dari <https://lsfdiscourse.org/legitimasi-kebahasaan-pierre-bourdieu-dialek-bahasa-sebagai-kapital-dalam-perwujudan-kekuasaan-simbolik/>
- IslamProgresif.ID. (2023). *Nasab dan Feodalisme dalam Dakwah Islam*. Islam Progresif.ID. Diakses dari <https://islamprogresif.id/nasab-dan-feodalisme-dalam-dakwah-islam>
- Jaringan Santri. (2021). *Habaib dan Penyebaran Islam di Betawi*. Jaringan Santri. Diakses dari <https://jaringansantri.com/habaib-dan-penyebaran-islam-di-betawi/> Kiki, Rakhmad Zailani. (2020) *Habaib dan Penyebaran Islam di Betawi*. Diakses dari <https://jaringansantri.com/habaib-dan-penyebaran-islam-di-betawi/>
- Muzemmil. (2024). Polemik Nasab Habaib: Framing Channel YouTube Rhoma Irama. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(2), 369-382. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i2.1185>
- Newsroom. (2024). *Ustaz Abdul Somad Berani Bongkar Nasab Habib Bahar Bin Smith, Benarkah Dia Keturunan Nabi? Ternyata...* Diakses dari <https://newsroom.id/2024/04/ustaz-abdul-somad-berani-bongkar-nasab-habib-bahar-bin-smith-benarkah-dia-keturunan-nabi-ternyata/>
- Ngaji Warisan Ulama. (2023). *Terhukum oleh opini, bukan oleh hukum syar'i*. Diakses dari <https://www.instagram.com/p/CxUu99gr9ku/>
- Nurjaman, I. M., Mutaqin, F., & Putra, T. N. F. (2023). Perkembangan Penulisan Sejarah Nasab dari Pra-Islam Hingga Islam dan Pengaruhnya di Nusantara. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 151–162. <https://doi.org/10.1557/djash.v2i3.34155>
- Panji Islam. (2022). *Living Sunnah, Otoritas Keagamaan dan Konstruksi Nasab Ba'Alwi. Panji Islam*. Diakses dari <https://www.panjiislam.com/living-sunnah-otoritas-keagamaan-dan-konstruksi-nasab-baalwi-39/>
- Panji Islam. (2023). *Dekonstruksi Gelar Habib Menghentikan Penjajahan: Khususnya untuk Warga NU dan Muhammadiyah – Polemik Nasab Habib*. Diakses dari <https://www.panjiislam.com/dekonstruksi-gelar-habib-menghentikan-penjajahan-khususnya-untuk-warga-nu-dan-muhammadiyah-polemik-nasab-habib/>
- Rabithah Alawiyah. (2025). *Sejarah. Rabithah Alawiyah.* Diakses dari <https://rabithahalawiyah.org/sejarah>
- Rminubanten. (2023). *Debat Banten Selesai: Nasab Ba Alawi Tak Tertolong*. Diakses dari <https://rminubanten.or.id/debat-banten-selesai-nasab-ba-alawi-tak-tertolong/?utm>

- Robet, Robertus (2015) Modernitas dan Tragedi: Kritik dalam Sosiologi Humanistik Zygmunt Bauman. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. 20(2), <https://doi.org/10.7454/MJS.v20i2.1030>
- Saputra, Nugie. (2017). *Diminta Massa, Habib Rizieq Akhirnya Hadir di Aksi 212*. Diakses dari <https://www.bernas.id/2017/02/99579/33391-diminta-massa-habib-rizieq-akhirnya-hadir-di-aksi-212/>
- Siregar, Zulhidayat. (2016). *Habib Rizieq: Aksi 212 Diikuti Jutaan Orang Berkat Pertolongan Allah*. Diakses dari <https://rmol.id/politik/read/2016/12/05/271193/habib-rizieq-aksi-212-diikuti-jutaan-orang-berkat-pertolongan-allah?utm>
- Surur, Moh., Rahmawati, Elok, & Maula, Rizki. (2024). Habib Sebagai Simbol dan Agen Dakwah di Indonesia: Kajian atas Peran Simbolik dalam Ruang Sosial. *Jurnal Asy-Syariah*. 26(1), 73–89.
- Tamwifi, Irfan. (2023). Dampak Tesis Kyai Imaduddin al-Bantani. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/nasionalis/65675413de948f304d663702/dampak-tesis-kyai-imaduddin-al-bantani?utm>
- Utsman Al-Bantani, Imaduddin. (2022). *Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia*. Banten: Al-Bantani Publishing. Cetakan I.
- Utsman Al-Bantani, Imaduddin. (2024). *Living Sunnah, Otoritas Keagamaan Dan Konstruksi Nasab Ba'Alwi*. Diakses dari <https://www.panjiislam.com/living-sunnah-otoritas-keagamaan-dan-konstruksi-nasab-baalwi-39/>
- Utsman Al-Bantani, Imaduddin. (2024). *Migrasi Klan Ba'Alwi Dan Pengakuan Sebagai Keturunan Nabi – Polemik Nasab Habib*. Diakses dari <https://www.panjiislam.com/migrasi-klan-baalwi-dan-pengakuan-sebagai-keturunan-nabi-polemik-nasab-habib/>
- Wahab, Muhibb Abdul. (2024). *Haji, Pendidikan Emansipasi dan Defeodalisasi*. Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id/id/haji-pendidikan-emansipasi-dan-defeodalisasi>
- Walisongobangkit. (2025). *Evolusi Sikap Warga Nahdlatul Ulama Terhadap Klaim Keturunan Ba'Alwi: Dampak Tesis KH Imaduddin Utsman al Bantani dan Penurunan Kepercayaan Terhadap Klaim Keturunan Rasulullah SAW*. Diakses dari <https://www.walisongobangkit.com/evolusi-sikap-warga-nahdlatul-ulama-terhadap-klaim-keturunan-baalwi-dampak-tesis-kh-imaduddin-utsman-al-bantani-dan-penurunan-kepercayaan-terhadap-klaim-keturunan-rasulullah-saw/>
- Weber, Max. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press. Terjemahan: G. Roth dan C. Wittich (Ed.).
- Zaman, M. (2021). Komodifikasi Konten Dakwah Habib Husein Ja'far Al-Hadar di YouTube: Ekspresi Kesalehan dan Wacana Baru dalam Kontestasi Keagamaan di Era Kontemporer. *Proceedings ICIS (International Conference on Islamic Studies)*, 1(1), 350-357.